

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ashudiqqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

D. Riant Nugroho. 2002. *Otonomi Daerah, Desentralisasi tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, PT. Alex Media Komputindi, Jakarta.

Davey, KJ, 1989, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, UI Press, Jakarta.

Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung

Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Manan, Bagir. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Perbit ANDI, Yogyakarta.

Marzuki, M Laica. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Direktorat Jendral dan Kepaniteraan MPR RI, Jakarta.

Rayid, M. Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Jakarta.

Syaukani, dkk. 2012. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syafrudin, Ateng, 1985. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*, Muja Muju, Bandung.

Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Perintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Makalah

Made Suwandi, “isu-isu strategis penataan otonomi daerah, makalah disampaikan pada Lokakarya Agenda Pemukiman dan Pembangunan Wilayah Indonesia 2000-2005, URDI-ITB-Agenda 21 Sektoral (EJ), hlm.4. Dikutip kembali oleh Robert A. Simanjutak, “Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah”, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa 100 Tahun*, Institute For Local Development Yayasan Tifa, 2005, hlm. 278.

Ni'Matul Huda, “Menuju Otonomi Luas bagi Daerah Pasca Orde Baru” makalah disampaikan dalam diskusi panel Revitalisasi Lembaga Legislatif Daerah Paca Orde Baru, Pusdiklat Laboratorium dan Departemen HTN Fakultas Hukum UII, 14 Juli 1999

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang prinsip pemberian otonomi daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata daerah Kabupaten Gunungkidul.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014

1. Data Elektronik

<http://www.wisata.gunungkidulkab.go.id/sekilas-gunungkidul>

